

Pengelolaan pariwisata alam



© BSN 2014

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Gd. Manggala Wanabakti
Blok IV, Lt. 3,4,7,10.
Telp. +6221-5747043
Fax. +6221-5747045
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata	ii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Istilah dan definisi	1
3 Prinsip dan kriteria pengelolaan pariwisata alam	3
4 Kriteria dan kerangka pengembangan indikator pengelolaan pariwisata alam	4
5 Manfaat ekonomi	7
Bibilografi	9



Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 8013:2014 Pengelolaan pariwisata alam digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan untuk pengelolaan pariwisata alam secara lestari.

Standar ini disusun dengan memperhatikan kesepakatan internasional terkait pengembangan pariwisata alam, yaitu (1) Deklarasi Quebec Tahun 2002 (*Quebec Declaration on Ecotourism*), (2) *Convention on Biodiversity (CBD)* 1992 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 (3) *COP 11 Decisions – Conventions on Biological Biodiversity*.

Standar ini disusun oleh Panitia Teknis 65-01 Pengelolaan hutan Kementerian Kehutanan, yang telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 29 November 2013 di Bogor. Hadir pada rapat tersebut keterwakilan dari pengelola kawasan, asosiasi terkait pariwisata alam, konsumen, pakar dan regulator.

Standar ini telah melalui proses jajak pendapat pada tanggal 10 Februari 2014 sampai tanggal 9 April 2014 dengan hasil akhir Rancangan Akhir SNI (RASNI) untuk ditetapkan menjadi SNI.



Pengelolaan pariwisata alam

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan prinsip, kriteria dan indikator pengelolaan pariwisata alam sebagai panduan pengelolaan pariwisata alam di kawasan hutan dan/atau kawasan lainnya yang dikelola dengan prinsip-prinsip pariwisata alam.

2 Istilah dan definisi

Untuk keperluan standar ini, istilah dan definisi berikut digunakan.

2.1

daya tarik wisata

segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan

2.2

distribusi

kegiatan penyebaran, penyaluran, dan pengiriman suatu produk sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

2.3

interpretasi

kegiatan memahami dan mengerti suatu obyek wisata alam dalam konteks sejarah, yang pengaturan dan pemanfaatannya dilakukan oleh pemandu wisata untuk dapat dijelaskan kepada pengunjung dengan tepat, benar dan menarik

2.4

kawasan hutan

wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap

2.5

keterbukaan akses

kemampuan untuk mendapatkan kemudahan dan kesempatan untuk ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan pariwisata alam

2.6

lansekap alami

suatu bentang alam dengan karakteristik tertentu yang dapat dinikmati oleh seluruh indera manusia dengan karakter yang menyatu secara alami dan harmonis untuk memperkuat karakter lansekap tersebut

2.7

manfaat ekonomi

keuntungan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat diperoleh masyarakat setempat, pemangku kepentingan, dan pengelola kawasan wisata yang terkait dengan keberadaan dan pemanfaatan suatu kegiatan pariwisata alam

2.8

modal sosial

sekelompok masyarakat yang memiliki ketaatan terhadap norma tertulis dan tidak tertulis, etika, bersikap terbuka dan sopan santun, serta mempunyai kepedulian terhadap sesama dan lingkungan masyarakat lokal maupun pendatang

2.9

sosial budaya

struktur sosial dan pola budaya dalam masyarakat

2.10

pariwisata

berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah

2.11

pariwisata alam

segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam

2.12

penataan fungsi ruang

proses perencanaan dari fungsi ruang yang pemanfaatan dan pengendaliannya dilakukan secara sistemik

2.13

penataan kelembagaan

proses perencanaan dari suatu kelembagaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendaliannya yang dilakukan sesuai dengan jenis tipe kelembagaannya

2.14

pengelolaan distribusi pengunjung

pengaturan kuota dan distribusi jumlah pengunjung dalam suatu kawasan wisata sebagai upaya untuk menghindari kerusakan obyek wisata, keamanan pengunjung, dan gangguan terhadap flora dan fauna yang berada di lokasi wisata

2.15

pengelolaan pariwisata alam

terpadu dalam perencanaan, penataan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, perlindungan, dan pengendalian pariwisata alam

2.16

produk wisata alam

berbagai produk dan jasa layanan kegiatan wisata alam yang ditawarkan kepada penggunaannya untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam

2.17

spesies dilindungi

semua jenis sumber daya alam nabati (flora) dan hewani (fauna) yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang dilarang untuk dipelihara, diperjual-belikan, dan dipertukarkan dalam rangka mempertahankan populasi dan habitatnya

2.18**spesies endemik**

semua jenis sumber daya alam nabati (flora) dan hewani (fauna) yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang merupakan jenis asli dalam suatu wilayah tertentu

2.19**spesies langka**

semua jenis sumber daya alam nabati (flora) dan hewani (fauna) yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara yang keberadaannya sudah sulit dijumpai (langka) di habitat aslinya atau habitat buaatannya

2.20**sumber daya lain**

jenis sumber daya selain sumber daya utama yang ada di kawasan pengelolaan pariwisata alam

2.21**vandalisme**

kegiatan perusakan atau sifat suka merusak yang dilakukan oleh pengunjung atas obyek dan daya tarik wisata yang dikunjunginya (seperti mencorat-coret, mengambil tumbuhan langka dan dilindungi dan sebagainya)

2.22**wisata alam**

kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan hutan dan/atau kawasan lainnya yang dikelola dengan prinsip-prinsip pariwisata alam

3 Prinsip dan kriteria pengelolaan pariwisata alam**3.1 Kelestarian fungsi ekosistem**

- a) Terpeliharanya lansekap alami
- b) Terpeliharanya keberadaan spesies endemik/langka/ dilindungi

3.2 Kelestarian obyek daya tarik wisata alam (ODTWA)

- a) Terpeliharanya keberadaan dan kualitas ODTW utama
- b) Pengembangan sumber daya lain/lingkungan yang mendukung ODTW utama
- c) Pencegahan dan penanganan vandalisme

3.3 Kelestarian sosial budaya

- a) Modal sosial
- b) Sosial budaya
- c) Keterbukaan akses

3.4 Kepuasan, keselamatan dan kenyamanan pengunjung

- a) Pelayanan prima
- b) Interpretasi obyek daya tarik wisata
- c) Keselamatan pengunjung dan sumber daya

3.5 Prinsip manfaat ekonomi

- 3.5.1 Manfaat bagi pengusaha
- 3.5.2 Manfaat bagi masyarakat
- 3.5.3 Manfaat bagi pemerintah

4 Kriteria dan kerangka pengembangan indikator pengelolaan pariwisata alam

4.1 Terpeliharanya lansekap alami

- a) Penataan fungsi ruang dan pengamanannya memperhatikan potensi sumber daya dan kaidah-kaidah yang berlaku termasuk norma dan estetika
- b) Pengelolaan produk wisata alam yang didasarkan atas informasi daya dukung potensi sumber daya dan monitoring-evaluasi kegiatan pengelolaan untuk perbaikan yang kontinyu
- c) Pengelolaan distribusi pengunjung dan penyediaan sistem informasi yang mendukung pemeliharaan lansekap alami
- d) Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana yang mendukung pemeliharaan lansekap alami
- e) Penataan kelembagaan yang mendukung efektifitas pemeliharaan lansekap alami
- f) Pengelolaan dampak negatif dan bahaya kegiatan pengelolaan terhadap pemeliharaan lansekap alami

4.2 Keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi

- a) Penataan fungsi ruang dan pengamanannya memperhatikan keberadaan jenis-jenis endemik/langka/dilindungi dan kaidah-kaidah yang berlaku termasuk norma dan estetika
- b) Pengelolaan produk wisata alam yang didasarkan pada daya dukung potensi sumber daya dan monitoring-evaluasi kegiatan pengelolaan untuk perbaikan yang kontinyu
- c) Pengelolaan distribusi pengunjung dan penyediaan sistem informasi yang mendukung pemeliharaan jenis-jenis endemik/langka/dilindungi
- d) Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana yang mendukung pemeliharaan jenis-jenis endemik/langka/dilindungi
- e) Penataan kelembagaan yang mendukung efektifitas pemeliharaan jenis-jenis endemik/langka/dilindungi
- f) Pengelolaan dampak negatif dan bahaya kegiatan pengelolaan terhadap pemeliharaan jenis-jenis endemik/langka/dilindungi

4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada

- a) Penataan fungsi ruang dan pengamanannya (prosedur, SDM dan sarana prasarana) memperhatikan ODTW utama pada kawasan tersebut
- b) Pengelolaan produk wisata alam (penyusunan program/paket wisata dan pemasaran) mengutamakan keunggulan ODTW utama yang tetap memperhatikan aspek konservasi serta monitoring-evaluasi kegiatan pengelolaan dilakukan untuk perbaikan yang kontinyu
- c) Perencanaan (interpretasi, distribusi, keamanan, keselamatan pengunjung dan sistem informasi) tetap memperhatikan kelestarian ODTW
- d) Perencanaan ODTW utama selalu mengunggulkan dan melestarikan alam.
- e) Penataan kelembagaan (SDM dan keuangan) yang mampu mengidentifikasi dan berorientasi pada kelestarian ODTW utama
- f) Pengelolaan dampak negatif dan bahaya akibat kegiatan pengelolaan terhadap kelestarian ODTW utama

4.4 Sumber daya lain/ lingkungan yang mendukung

- a) Penataan fungsi ruang dan pengamanan sumber daya lain/ lingkungan ditujukan untuk mendukung kelestarian ODTW utama
- b) Pengelolaan produk wisata alam (penyusunan program/ paket wisata dan pemasaran) sumber daya lain/ lingkungan diberi kelonggaran dalam pengembangannya dan monitoring-evaluasi kegiatan pengelolaan dilakukan untuk perbaikan yang kontinyu
- c) Perencanaan (interpretasi, distribusi, keamanan, keselamatan pengunjung dan sistem informasi) pada sumber daya lain/ lingkungan lebih bebas dikembangkan sebagai obyek wisata dan tidak mengganggu ODTW utama
- d) Perencanaan transportasi dan akomodasi dilakukan dengan memperhatikan keberadaan sumber daya lain dan lingkungannya
- e) Penataan kelembagaan (SDM dan keuangan) yang mampu mengidentifikasi kelestarian sumber daya lain/ lingkungan
- f) Pengelolaan dampak dan bahaya akibat kegiatan pengelolaan terhadap kelestarian sumber daya lain/ lingkungan

4.5 Vandalisme tidak ada

- a) Penataan fungsi ruang dan pengamanan untuk mencegah terjadinya vandalisme terutama pada ODTW utama
- b) Pengelolaan produk wisata alam (penyusunan program/paket wisata dan pemasaran) dikembangkan dengan pertimbangan agar tidak terjadi vandalisme dan monitoring-evaluasi kegiatan pengelolaan dilakukan untuk perbaikan yang kontinyu
- c) Perencanaan (interpretasi, distribusi, keamanan, keselamatan pengunjung dan sistem informasi) membuat skema-skema persuasif untuk mencegah vandalisme
- d) Perencanaan transportasi dan akomodasi tidak membuka peluang terjadinya vandalisme
- e) Penataan kelembagaan (SDM dan keuangan) yang tanggap terhadap upaya mencegah dan menanggulangi vandalisme
- f) Pengelolaan dampak dan bahaya akibat vandalisme

4.6 Modal sosial

- a) Penataan fungsi ruang dan pengamanannya memperhatikan pemberdayaan modal sosial masyarakat setempat
- b) Pengelolaan produk wisata alam memperhatikan pemberdayaan modal sosial masyarakat setempat
- c) Pengelolaan distribusi pengunjung dan penyediaan sistem informasi memperhatikan pemberdayaan modal sosial masyarakat setempat
- d) Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana memperhatikan pemberdayaan modal sosial masyarakat setempat
- e) Penataan kelembagaan memperhatikan pemberdayaan modal sosial masyarakat setempat
- f) Pengelolaan dampak negatif dan bahaya memperhatikan pemberdayaan modal sosial masyarakat setempat

4.7 Sosial budaya

- a) Penataan fungsi ruang dan pengamanannya memperhatikan sosial budaya masyarakat
- b) Pengelolaan produk wisata perlu dikomunikasikan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaannya tidak melanggar norma/ adat dan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat
- c) Pengelolaan distribusi pengunjung dan penyediaan sistem informasi mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat

- d) Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana yang melibatkan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat dan tidak melanggar norma/ adat
- e) Penataan kelembagaan perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat dan tidak melanggar norma/ adat
- f) Pengelolaan dampak negatif perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat dan tidak melanggar norma/ adat

4.8 Keterbukaan akses

- a) Penataan fungsi ruang dan pengamanannya memperhatikan akses masyarakat
- b) Pengelolaan produk wisata memperhatikan akses masyarakat
- c) Pengelolaan distribusi pengunjung dan penyediaan sistem informasi tidak memperhatikan akses masyarakat
- d) Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana memperhatikan akses masyarakat
- e) Penataan kelembagaan mempertimbangkan akses masyarakat
- f) Pengelolaan dampak negatif memperhatikan akses masyarakat

4.9 Pelayanan prima

- a) Penataan fungsi ruang dan pengamanannya membuka ruang pelayanan prima
- b) Pengelolaan produk wisata alam yang didasarkan atas daya dukung potensi sumber daya dan monitoring-evaluasi kegiatan pengelolaan untuk mendukung pelayanan prima
- c) Pengelolaan distribusi pengunjung dan penyediaan sistem informasi yang mendukung pelayanan prima
- d) Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana yang mendukung pelayanan prima
- e) Penataan kelembagaan yang mendukung pelayanan prima
- f) Pengelolaan dampak negatif dan bahaya kegiatan pengelolaan terhadap pelayanan prima

4.10 Interpretasi

- a) Penataan fungsi ruang dan pengamanannya memungkinkan dilaksanakannya interpretasi dengan baik.
- b) Pengelolaan produk wisata alam berbasis pada kegiatan interpretasi
- c) Pengelolaan distribusi pengunjung dan penyediaan sistem informasi yang mendukung interpretasi
- d) Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana yang mendukung kegiatan interpretasi
- e) Penataan kelembagaan yang mendukung kegiatan interpretasi
- f) Interpretasi merupakan salah satu sarana untuk memsosialisasikan dampak negatif dan bahaya kegiatan pengelolaan

4.11 Keselamatan pengunjung dan sumber daya/obyek

- a) Penataan fungsi ruang dan pengamanannya membuka ruang keselamatan pengunjung dan sumber daya/ obyek
- b) Pengelolaan produk wisata alam yang didasarkan atas daya dukung potensi sumber daya dan monitoring-evaluasi kegiatan pengelolaan untuk mendukung keselamatan pengunjung dan sumber daya/ obyek
- c) Pengelolaan distribusi pengunjung dan penyediaan sistem informasi yang mendukung keselamatan pengunjung dan sumber daya/ obyek
- d) Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana yang mendukung keselamatan pengunjung dan sumber daya/ obyek
- e) Penataan kelembagaan yang mendukung keselamatan pengunjung dan sumber daya/ obyek

- f) Pengelolaan dampak negatif dan bahaya yang mendukung keselamatan pengunjung dan sumber daya/ obyek

CATATAN: Keselamatan pengunjung meliputi tiga aspek penting yaitu keselamatan pengunjung terhadap sumber daya; keselamatan sumber daya terhadap pengunjung; keselamatan pengunjung terhadap pengunjung.

5 Manfaat ekonomi

5.1 Manfaat bagi masyarakat

- a) Pengelolaan kawasan dapat meningkatkan nilai ekonomi dan peluang usaha bagi masyarakat dan menjamin terciptanya peluang/kesempatan kerja sumber-sumber ekonomi masyarakat
- b) Pengelolaan produk wisata alam dapat menciptakan peluang/kesempatan kerja bagi masyarakat
- c) Pengelolaan pengunjung dapat menciptakan peluang/kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat
- d) Pengelolaan sarana dan prasarana dapat menciptakan peluang/kesempatan kerja bagi masyarakat
- e) Pengelolaan kelembagaan dapat menciptakan peluang/kesempatan kerja bagi masyarakat
- f) Pengelolaan dampak negatif dan bahaya dapat menciptakan peluang/kesempatan kerja bagi masyarakat

5.2 Manfaat bagi pengusaha

- a) Pengelolaan kawasan dapat meningkatkan sumber pendapatan dan menjamin kelangsungan kegiatan usaha
- b) Pengelolaan produk wisata alam dapat menjamin kelangsungan kegiatan usaha dan meningkatkan sumber pendapatan dan efisiensi kegiatan usaha
- c) Pengelolaan pengunjung dapat menciptakan citra (*brand image*) perusahaan dan menjamin kelangsungan kegiatan usaha
- d) Pengelolaan sarana dan prasarana dapat meningkatkan sumber pendapatan hasil usaha jasa dan sarana pariwisata alam
- e) Pengelolaan kelembagaan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan menjamin meningkatnya pendapatan hasil usaha
- f) Pengelolaan dampak negatif dan bahaya dapat menjamin citra (*brand image*) perusahaan dan menjamin kelangsungan kegiatan usaha

5.3 Manfaat bagi pemerintah

- a) Pengelolaan kawasan dapat memelihara potensi nilai ekonomi kawasan hutan dan meningkatkan sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan atau sumber pendapatan yang lain
- b) Pengelolaan produk wisata alam dapat memelihara potensi nilai ekonomi kawasan hutan dan meningkatkan sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan atau sumber pendapatan yang lain
- c) Pengelolaan pengunjung dapat meningkatkan sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan atau sumber pendapatan yang lain
- d) Pengelolaan sarana dan prasarana dapat meningkatkan sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan atau sumber pendapatan yang lain
- e) Pengelolaan kelembagaan dapat menjamin kelangsungan sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan atau sumber pendapatan yang lain

- f) Pengelolaan dampak negatif dan bahaya dapat memelihara potensi nilai ekonomi kawasan hutan dan menjamin kelangsungan sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan atau sumber pendapatan yang lain



Bibilografi

Convention on Biodiversity (CBD) 1992 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994.

COP 11 Decisions – Convention on Biological Diversity.
Deklarasi Quebec (*Quebec Declaration on Ecotourism*) Tahun 2002.

Putnam, Robert D. (2000), *Bowling Alone: The Collapse and revival of American Community*, New York: Simon and Schuster. USA.

Fukuyama, F. (1995), *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, New York: Free Press. USA.

Neis, M. 2006. Modal Sosial: Modal BKM dan Masyarakat Menanggulangi Kemiskinan.

Usman, S. 2013. Pengembangan Masyarakat Berbasis Modal Sosial.

Ribbot, J.C., & N.L. Peluso. 2003. *A Theory of Access*. Rural Sociology 68 (2) pp 153-181.

Hasbullah, J. 2006. *Sosial Capital* (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia). Jakarta: MR United Press.

Inayah. 2012. Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan. Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 12 No. 1, April 2012.

Jones, S. 2005. *Community-based Ecotourism: The Significance of Social Capital*. *Annals of Tourism Research* 32(2): 302-324.

Nahapiet, J., dan Ghosal, S. 1998. *Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage*. *The Academy of Management Review*, 23(2):242-266.

Oktadiyani, P. 2010. Modal Sosial Masyarakat Kawasan Penyangga Taman Nasional Kutai (TNK) dalam Pengembangan Ekowisata. Tesis. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Portes, A. (1998). "Social capital: Its origins and applications in modern sociology." *Annual Review of Sociology* 24: 1-24.

Pretty, J. 2003. *Social Capital and the Collective Management*.